

Eksistensi hak debitor pailit untuk mengajukan permohonan reenvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan =
The existence of bankrupt debtor rights to indict reenvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute

Adis Nur Hayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20466434&lokasi=lokal>

Abstrak

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai eksistensi atas berhak atau tidaknya debitor pailit mengajukan permohonan reenvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan disimpulkan bahwa debitor pailit tidaklah berhak mengajukan permohonan reenvooi procedure, hal ini karena pada saat proses tersebut berlangsung kewenangan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak lagi berada pada debitor melainkan telah berpindah kepada kurator.

Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah sepatutnya memperjelas pengaturan terkait reenvooi procedure dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

The subject matter that would be discussed in this paper is about the existence of the right or wrong of the bankrupt debtor to indict a reenvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute. The subject matter will be analyzed by using normative juridical research method which means the research is based in regulation and library research.

Based on the analysis, it is concluded that the bankrupt debtor is not entitled to indict for reenvooi procedure, that is because at the time the process takes place, the authority of the management and or the settlement of bankruptcy assets is no longer on the debtor but has moved to the curator.

The research results suggest that the government should improve the regulation related to the reenvooi procedure in Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts.